

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tanggung jawab guru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), guru harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional di satuan PAUD (Kemdikbud, 2014). Perdirjen GTK No.2626/B/HK.04.01/2023 tentang Kompetensi Guru bahwa guru harus mampu memiliki kompetensi pedagogik yaitu mampu melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Susilo (2011: 115) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi menyiapkan perangkat pembelajaran/modul ajar, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) tahun 2014 s.d 2019 dari 6012 orang guru PAUD yang telah diuji kompetensi secara nasional, 4250 orang berhasil lulus dengan tingkat kelulusan 71%. Akan tetapi pada provinsi Sumatera Utara persentase yang lulus uji kompetensi lebih rendah (49%) dari pada yang tidak lulus (51%) (BP-PAUD DIKMAS, 2019).

Sementara itu lembaga PAUD di Indonesia mengalami peningkatan baik di pusat perkotaan maupun di daerah-daerah pedesaan bahkan keseluruh pelosok tanah air (Hudori, 2019). Secara nasional, telah mencapai 237.552 satuan PAUD yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia bahkan 9 PAUD diluar negeri.

Khusus provinsi Sumatera terdapat 11.114 satuan PAUD yang tersebar di 34 kabupaten kota dengan rincian TK 5.398, KB. 5.335, 63 TPA, 428 SPS (Kemdikbud, 2023). Jumlah satuan PAUD di kabupaten Deli Serdang terdiri dari TK 1.025, KB 338, TPA 3, SPS 7 (Kemdikbud, 2023).

Peningkatan satuan PAUD diharapkan tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas atau mutu. Mutu PAUD diukur dari pencapaian Standar Nasional PAUD dan mengutamakan kualitas proses pembelajaran. Namun fakta bahwa pada provinsi Sumatera utara, satuan PAUD yang terakreditasi A sebanyak 105 lembaga, Akreditasi B sebanyak 523 lembaga, dan Akreditasi C sebanyak 602 lembaga (BANPAUD-PNF, 2019). Dari data tersebut menunjukkan perlunya peningkatan mutu PAUD, dimana hal ini tidak terlepas dari peran guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan PAUD dan sebagian indikator mutu PAUD terkait dengan tugas guru PAUD.

Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) dalam rangka penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka menjadi suatu dasar kurikulum yang menerapkan pembelajaran intrakurikuler beragam. Kurikulum dengan konten lebih optimal supaya peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk memahami konsep dan meningkatkan kompetensi. Guru mempunyai keleluasaan memilih perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Merdeka belajar merupakan pengejawentahan dari proses belajar yang dikelola oleh peserta didik secara mandiri. Peserta didik melakukan

pengelolaan terkait tujuan, cara, dan penilaian berdasarkan sudut pandang pengajar.

Merdeka belajar berarti melibatkan murid dalam penentuan tujuan, cara, dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Perangkat ajar yang digunakan meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Kreatifitas guru diperlukan dalam mengurangi kesulitan belajar dan keterbatasan peserta didik agar bahan ajar dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh para peserta didik. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Modul ajar sebagai bagian dari dokumen yang mengesensikan tujuan, langkah, dan media pembelajaran. Selain itu, asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik diberikan keleluasaan dalam kegiatan modifikasi modul ajar sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Selain itu, pendidik dituntut untuk mampu memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Pendidik menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai jenis sumber. Dalam hal ini, kemampuan literasi sangat dibutuhkan oleh pendidik. Literasi merupakan salah satu hal yang menjadi target perbaikan pemerintah untuk meningkatkan minat baca dan tulis masyarakat. Kemampuan perangkat ajar dapat langsung digunakan pendidik untuk mengajar dan merancang pembelajaran. Modul ajar merupakan

perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan (Nurdyansyah, N, 2018). Modul ajar mempunyai peran utama untuk menopang guru dalam merancang pembelajaran. Pada penyusunan perangkat pembelajaran yang berperan penting adalah guru, guru diasah kemampuan berpikir untuk dapat berinovasi dalam modul ajar.

Perubahan kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka yang diterapkan secara bertahap, memaksa lahirnya kreativitas mengajar guru. Pada saat penerapan kurikulum merdeka sudah tentu membawa efek dan perubahan secara signifikan mengenai guru dan tenaga pendidik di sekolah dari segi administrasi pembelajaran, strategi dan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan bahkan proses evaluasi pembelajaran (Rahimah, 2022).

Kurikulum merdeka belajar memiliki empat prinsip yang diubah menjadi arahan kebijakan baru, salah satu diantaranya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kini terkenal dengan modul ajar (Kemdikbud, 2019).

Secara ideal, guru perlu menyusun modul ajar secara maksimal, namun kenyataannya banyak guru yang belum paham betul teknik menyusun dan mengembangkan modul ajar, terlebih

pada kurikulum merdeka belajar. Proses pembelajaran yang tidak merencanakan modul ajar dengan baik sudah dapat dipastikan penyampaian konten kepada siswa tidak sistematis, sehingga pembelajaran terjadi tidak seimbang antara guru dan siswa. Dapat dipastikan hanya guru yang aktif atau sebaliknya dan pembelajaran yang dilaksanakan terkesan kurang menarik karena guru tidak mempersiapkan modul ajar dengan baik. Oleh karena itu, untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan bagi guru PAUD dalam menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka. Pelatihan dapat memberi kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang dapat mengubah perilakunya, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Finks dan Willits dalam Fadlurrahman (2009) mengatakan, “Hampir semua organisasi besar memiliki program untuk pelatihan dan pengembangan pekerja.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah PAUD dan dua orang guru PAUD di masing-masing sekolah PAUD sekabupaten Deli Serdang yang totalnya tiga orang kepala sekolah PAUD dan enam orang guru PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 ditemukan bahwa pelatihan bagi guru PAUD sebelumnya pernah dilakukan namun kenyataannya pelatihan penyusunan modul ajar yang telah dilaksanakan selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya, yaitu: 1) belum ada buku panduan pelatihan bagi penyelenggara; 2) tidak adanya bahan ajar/modul pelatihan; 3) sarana dan prasarana yang kurang memadai; 4) ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan hal tersebut dikarenakan pelatihan tidak di manajemen dengan baik; dan 5) evaluasi belum menyeluruh. Menurut pendapat Musfah

(2011:61) bahwa pelatihan sering tidak memenuhi hasil yang diharapkan oleh penyelenggara. Karena itu, penyelenggara pelatihan profesional harus merencanakan dengan matang setiap pelatihan, mulai dari pemilihan materi, waktu, tempat, metode, hingga kualitas instruktur. Sehingga dalam pelatihan perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengawasan agar tujuannya dapat tercapai dengan maksimal.

Pelatihan menurut Rothwell dalam Toharudin (2019) adalah: *"training is the field of activity that focus on identifying, assuring, and helping develop, through planned learning, the key competencies that enable individuals to perform current of future jobs"*. Oemar Hamalik (2007: 10) menyampaikan bahwa "Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dalam rangka pembinaan ketenagaan dalam suatu organisasi". Dapat disimpulkan pelatihan adalah aktivitas yang berfokus pada upaya mengidentifikasi, menjamin, dan membantu untuk mengembangkan melalui perencanaan pembelajaran, kompetensi pokok yang memungkinkan seseorang mampu menampilkan pekerjaan pada masa yang akan datang, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus diperhatikan kualitas dan manajemennya.

Gaffar dan Nurdin (2008:569) menyatakan bahwa kelemahan dari sistem pendidikan dan pelatihan adalah disebabkan lemahnya manajemen pelatihan pada semua tingkatan, baik level makro, mezo, maupun mikro. Pendapat ini sejalan dengan hasil studi lapangan diperoleh informasi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan guru PAUD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang berjalan selama ini masih banyak kekurangan terutama terkait

dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pada tahap awal pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan proses *needs assesment* yang tepat terkait dengan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar. Haris Mudjiman (2006: 57) menyampaikan ada 5 (lima) unsur pokok dalam manajemen pelatihan, kelima unsur tersebut adalah “analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, penyusunan bahan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan penilaian pelatihan”. Oleh karena itu, manajemen pelatihan atau pengelolaan pelatihan adalah sama sehingga pada penelitian ini akan memakai istilah manajemen pelatihan.

Berdasarkan wawancara kedua pada tanggal 17 Januari 2024 dengan tiga orang guru PAUD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang diperoleh informasi bahwa penyelenggaraan pelatihan guru PAUD dilaksanakan atas dasar program kerja semata melainkan bukan atas dasar kebutuhan guru PAUD terutama dalam menyusun modul ajar, juga peserta pelatihan tidak diukur kemampuannya baik pada saat sebelum pelatihan maupun selesai pelatihan. Hal ini yang menarik untuk diteliti, bahwasanya kegiatan pelatihan yang selama ini diselenggarakan pada PAUD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip manajemen pelatihan yang sebenarnya dan tidak diselenggarakan atas dasar kebutuhan guru PAUD terutama dalam rangka menyusun modul ajar.

Stufflebeam dalam Herlina, Wiwin (2021: 10), asesmen kebutuhan ataupun *needs assessment* dimaksud selaku sesuatu proses memastikan suatu yang diperlukan serta bermanfaat dalam menggapai tujuan yang diharapkan. Guna utama dari asesmen kebutuhan ialah: (1) menolong memastikan apa kebutuhan

yang terdapat serta gimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dialamatkan; serta (2) memastikan kriteria evaluasi sesuatu program (efisiensi serta daya guna). Dalam konteks perancangan kurikulum diklat, pada prinsipnya guna asesmen kebutuhan ialah berupaya menciptakan perbandingan ataupun diskrepansi antara apa yang idealnya diidamkan (*desired behavior*). Diskrepansi ataupun gap tersebut menimbulkan terdapatnya kebutuhan serta kebutuhan itu menimbulkan terdapatnya kasus yang wajib dipecahkan. Apabila diskrepansi ditemui hingga bisa dicari tujuan pemecahan permasalahan. Oleh sebab kebutuhannya banyak hingga butuh diadakan prioritas

Basri dan Rusdiana (2015: 28-29) menyatakan bahwa peran manajemen tidak kalah pentingnya dalam kesuksesan sebuah pelatihan. Jika diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, kegiatan pelatihan harus dikelola/dimanajemen dengan baik mulai dari adanya kegiatan, identifikasi kebutuhan, perancangan/pembuatan program, pengorganisasian pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan secara sistematis. Sehingga manajemen pelatihan dapat menjadi alternatif yang baik untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum merdeka dan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan permasalahan dan kelemahan dari manajemen pelatihan yang telah dilaksanakan, peneliti tertarik untuk mengembangkan model manajemen pelatihan yang cermat mencakup perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, dan pengawasan/ evaluasinya. Melalui manajemen pelatihan tersebut guru tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan penyusunan bahan ajar selama mengikuti pelatihan, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan



dan ketrampilan yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan secara mandiri. Perlu kiranya pengembangan model pelatihan yang mampu menumbuhkan ketertarikan partisipan untuk belajar dan menyiapkan bantuan belajar agar partisipan benar-benar dapat belajar untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mampu untuk belajar secara mandiri. Maka perlu dilakukannya pelatihan menyusun modul ajar, kemudian setelah melakukan pelatihan peserta mengupload modul ajar yang mereka buat ke Platform Merdeka Mengajar bagian mencari dan berbagi inspirasi menu bukti karya. Bukti Karya merupakan tempat mendokumentasikan karya guru dan kepala sekolah. Karya yang dibuat menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Karya yang telah disimpan ke Bukti Karya dapat diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang dibagikan” (Kemendikbud Ristek, 2021).

Manajemen atau pengelolaan program pelatihan penyusunan bahan ajar yang baik dalam pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan oleh Barnardin dan Russel dalam Ambar & Rosidah (2003:178), bahwa dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat) mempunyai tiga tahap aktivitas yang harus dilalui, mencakup perencanaan kebutuhan, pelaksanaan program, dan penilaian/evaluasi program pelatihan. Ketiga tahap ini semestinya diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan penyusunan bahan ajar sebelumnya agar kualitas pelatihan menjadi baik sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Berikut penelitian pengembangan model yang berhubungan dengan pengembangan model manajemen pelatihan menyusun modul ajar yang dikembangkan oleh peneliti. Pertama, penelitian Fatimasari (2021)

“Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Berbasis TIK di SMK Negeri 12 Medan”. Model manajemen Pelatihan berbasis TIK merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan peningkatan kompetensi TIK guru. Pengembangan model manajemen pelatihan berbasis TIK dibagi menjadi empat yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi kemudian tindak lanjut pasca pelatihan dan hasil. Pengelola Pelatihan adalah SMK Negeri 12 Medan yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas kelancaran dari kegiatan pelatihan secara daring. Ketua panitia adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sekretaris, bendahara, koordinator pelaksana, ditugaskan kepada guru dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 12 Medan. Tugas dan tanggungjawab masing-masing pengelola dikoordinasikan melalui rapat persiapan yang dipimpin oleh ketua panitia pengelola pelatihan. Kekurangan dari model ini adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara daring, sehingga masih perlu dilakukan pengujian model secara luas. Maka dari itu perlu dikembangkan model manajemen pelatihan secara luring supaya hasilnya lebih maksimal.

Yang kedua, penelitian Hidayati, wahyu.dkk (2022) Pelatihan Pembuatan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Guru PAUD Bina Tunas Bangsa Lidah Wetan Lakarsantri: bahwa pelatihan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka bagi guru-guru PAUD Bina Tunas Bangsa Lidah Wetan Lakarsantri, Surabaya dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, modul ajar kurikulum merdeka bagi guruguru PAUD Bina Tunas Bangsa Lidah Wetan Lakarsantri, Surabaya telah memenuhi syarat modul ajar yang baik ditinjau dari identitas, syarat teknis, kebahasaan, isi/konsep dan sikap ilmiah yang dilatihkan. Dan yang terakhir, guru peserta pelatihan memberikan respons yang baik terhadap pelaksanaan pelatihan

penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan pelatihan dapat memaksimalkan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar. Kekurangan dari model ini adalah tidak ada refleksi akhir setelah adanya pelatihan. Maka dari itu perlu dilakukan refleksi atau implementasi yang dilakukan para guru setelah melaksanakan pelatihan seperti berbagi praktik baik ke dalam platform merdeka belajar.

Yang ketiga, Wardah Hayati (2018) Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Arab Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Melalui Supervisi Teknik Workshop Model ADDIE di SMA Kota Langsa: untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 dapat diterapkan supervisi teknik workshop model ADDIE. Hasil penelitian pada Siklus I tergolong dalam kategori cukup dengan nilai rata rata 78 dan pada siklus II tergolong dalam kategori baik dengan nilai rata rata 85,6, dan hal ini menunjukkan peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Dan hasil Analisa data disimpulkan bahwa penerapan supervise teknik *workshop* model *ADDIE* dapat meningkatkan kompetensi guru dalam meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Kekurangan dari model ini adalah pelatihan tidak menggunakan fungsi-fungsi manajemen dan penerapan RPP masih kurikulum lama. Sehingga masih perlu adanya pengembangan dengan melaksanakan pelatihan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian menyusun modul ajar berdasarkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka.

Berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian pengembangan model-model manajemen pelatihan menyusun modul ajara terdahulu, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengembangan model manajemen pelatihanlah yang tepat diterapkan dalam menyusun modul ajar guru PAUD. Karena dengan model manajemen pelatihan pelaksanaannya bisa runtun dan teratur karena melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya, sehingga dapat mencapai tujuan pelatihan yaitu guru mampu menyusun modul ajar. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Ditemukan sebagian guru mengajar di kelas tidak menggunakan atau membawa modul ajar
2. Guru mengajar tidak menggunakan modul ajar sesuai dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka
3. Banyak guru yang belum paham cara menyusun dan mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka
4. Pelatihan bagi guru sudah jarang dilakukan terutama pelatihan dalam menyusun modul ajar
5. Pelatihan yang selama ini dilakukan hanya sebagai program kerja semata bukan berdasarkan kebutuhan guru
6. Belum ada buku panduan pelatihan bagi penyelenggara
7. Sarana dan prasarana pada saat pelatihan kurang memadai

8. Ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan pelatihan hal ini dikarenakan pelatihan tidak di manajemen dengan baik
9. Evaluasi belum menyeluruh dan perlu diadakan tindak lanjut tentang pelaksanaan pelatihan menyusun modul ajar dalam penelitian yang ingin dikembangkan ini.

### **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas ada banyak masalah yang muncul untuk diteliti. Setiap masalah yang muncul tentu memerlukan penelitian sendiri, maka masalah utama dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengembangan model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pengembangan model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana kelayakan model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang?

3. Bagaimana efektifitas model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis proses pengembangan model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
2. Kelayakan model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
3. Menganalisis efektifitas model manajemen pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan dalam menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar bagi guru PAUD di pusat kerja gugus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang manajemen pelatihan guru PAUD untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun modul ajar.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi kepala sekolah PAUD dalam upaya melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun modul ajar.
- b. Menambah pemahaman bagi kepala sekolah PAUD tentang pentingnya pelaksanaan manajemen pelatihan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan guru PAUD menyusun modul ajar pada platform merdeka mengajar.
- c. Bagi guru, dengan adanya manajemen pelatihan berbasis kebutuhan guru untuk menyusun dan mengembangkan modul ajar pada platform merdeka mengajar.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam skala yang lebih luas sehingga desain produk yang dihasilkan bisa lebih komprehensif.